



Buletin

Parlementaria



Usulan Revisi UU Desa, DPR Terima Aspirasi Kades Se-Indonesia

Nomor 1230/IV/1/2023 • Januari 2023



9 772614 339005



3 Indonesia Mampu
Miliki Layanan
Kesehatan
Berkelas
Internasional



4 Gus Muhaimin
Minta Persebaran
Dokter Tak Hanya
Menumpuk
di Kota



Usulan Revisi UU Desa, DPR Terima Aspirasi Kades Se-Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui massa pengunjuk rasa

yang berasal dari para perangkat desa se-Indonesia, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam aspirasinya, para perangkat ke desa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa tuntutan adalah terkait dengan masa jabatan kepala desa, moratorium pemilihan kepala desa, pejabat pelaksana yang ditugaskan, hingga permasalahan dana desa.

"Untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan (masa jabatan) menjadi sembilan tahun tanpa periodisasi, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk revisi (undang-undang) itu ada dua yang berkompeten, yaitu pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, mereka juga saya minta untuk melakukan lobi ke pemerintah," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (17/1).

Ia juga menyebut DPR telah memberikan fasilitas bagi perwakilan perangkat kepala desa untuk bertemu dengan Baleg DPR RI membahas tuntutan revisi UU Desa. Diketahui, pertemuan perwakilan perangkat desa dengan Baleg DPR RI itu telah berlangsung di hari yang sama pasca melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR tersebut.

"Terutama harapan dari kepala-kepala desa agar Revisi Undang-Undang Nomor 6 ini bisa masuk dalam Prolegnas di 2023," papar Dasco. Dengan bertemu Baleg DPR RI itu, ia menegaskan bahwa aspirasi para Kades tersebut didengar DPR dan akan dibicarakan dengan serius.



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui massa pengunjuk rasa yang berasal dari para perangkat desa se-Indonesia, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (17/1/2022). Dalam aspirasinya, para perangkat ke desa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UNTUK MEREVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 MENGENAI POIN PENAMBAHAN (MASA JABATAN) MENJADI SEMBILAN TAHUN TANPA PERIODISASI, TADI SUDAH SAYA SAMPAIKAN BAHWA UNTUK REVISI (UNDANG-UNDANG) ITU ADA DUA YANG BERKOMPETEN, YAITU PEMERINTAH DAN DPR. OLEH KARENA ITU, MEREKA JUGA SAYA MINTA UNTUK MELAKUKAN LOBI KE PEMERINTAH.

Diketahui, ribuan kades yang demo di depan DPR itu berasal dari berbagai daerah. Salah satunya kades se-kabupaten Purworejo yang turut hadir ke Senayan demi perpanjangan masa jabatan sembilan tahun. Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo yang tergabung dalam Paguyuban Kades Lurah dan Perangkat Desa Se-kabupaten Purworejo (Polosoro) akan menyampaikan tuntutan mereka terkait masa jabatan sembilan tahun.

Sekjen Polosoro Dwinanto, dalam keterangannya menyampaikan dalam aksi damai nasional tersebut Polosoro tak hanya ikut menyampaikan tuntutan terkait masa jabatan sembilan tahun. Tapi, juga akan menyuarakan tentang aturan dana desa. [we/rdn](https://www.berita-rdn.com)

Scan QR untuk berita selengkapannya



Indonesia Mampu Miliki Layanan Kesehatan Berkelas Internasional



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani ketika melakukan peninjauan pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali atau Bali Internasional Hospital yang berada dalam kawasan ekonomi khusus (KEK) di Sanur, Denpasar, Bali, Senin (16/1/2023).

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan dengan adanya rumah sakit bertaraf internasional diharapkan masyarakat Indonesia tak perlu lagi berobat ke luar negeri. Hal itu disampaikan Puan ketika melakukan peninjauan pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali atau *Bali Internasional Hospital* yang berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sanur, Denpasar, Bali, Senin (16/1).

Tujuan pembangunan rumah sakit ini adalah untuk mendorong wisata kesehatan berkelas internasional di Indonesia. Puan berharap tren kesehatan masyarakat Indonesia dapat berubah dengan adanya rumah sakit ini. "Kita sudah lama dengar bahwa masyarakat Indonesia yang mampu berobat di luar negeri itu banyak ke Singapura, Malaysia, dan lainnya," ucap Puan.

Menurut Puan, hal ini bukan hanya soal penambahan devisa semata. Namun, kata Puan, juga untuk kemajuan dunia kesehatan Indonesia. "Untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu. Bahwa Indonesia yang maju memiliki layanan kesehatan yang berkelas internasional," tegas Legislator asal Jawa Tengah itu.

Rumah Sakit Internasional Bali pun nantinya dapat menambah pilihan paket wisata di Bali. Sebagai destinasi ternama dunia, Bali dinilai akan semakin memiliki nilai jual dengan adanya fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Untuk diketahui, terdapat sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung di KEK Sanur. Salah satunya pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali bertaraf dunia yang bekerja sama dengan rumah sakit terbesar di Amerika Serikat, yakni Mayo Clinic. **hal/rdn**



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSi (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos, (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firsta Dye, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rini Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Gus Muhaimin Minta Persebaran Dokter Tak Hanya Menumpuk di Kota

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat

(Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah segera melakukan pemerataan sebaran dokter sesuai rasio jumlah penduduk di masing-masing daerah, tak terkecuali sebaran dokter spesialis. Menurut politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin ini, sebaran dokter yang tidak proporsional menyebabkan penanganan pasien di berbagai fasilitas kesehatan tidak maksimal, bahkan kerap berujung pada tingginya angka pasien meninggal dunia.

"Kembali saya ingatkan sebaran dokter jangan cuma di kota-kota besar saja, harus merata di seluruh Indonesia sesuai rasio jumlah penduduk. Saya kira kasus-kasus kematian pasien akibat lamban mendapatkan penanganan medis tidak boleh lagi terjadi," tutur Gus Muhaimin di Jakarta sebagaimana pernyataan tertulis yang diterima **Parlementaria** pada Senin (9/1).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperbanyak beasiswa pendidikan calon dokter, tak terkecuali dokter spesialis. "Negara seharusnya lebih banyak lagi menggelontorkan beasiswa pendidikan kedokteran. Memang ini bukan hal mudah, tapi saya kira bisa dilakukan agar sebaran dokter bisa lebih merata, lebih banyak lagi," terang Gus Muhaimin.

Selain Kemenkes, Gus Muhaimin mengingatkan pemerintah daerah proaktif mengalokasikan beasiswa kedokteran bagi generasi muda yang berprestasi dan kurang mampu. Dengan begitu ia optimis masalah pemerataan dokter dapat teratasi. "Pemda saya minta juga proaktif, misalnya dengan menyediakan beasiswa pendidikan kedokteran untuk siswa-siswa berprestasi dan kurang mampu. Jadi tidak bergantung pada pusat saja," terang Legislator Dapil Jawa Timur VIII itu.

Merujuk pada data Kemenkes, jumlah dokter di Indonesia saat ini berjumlah

146.162 orang. Menurut Gus Muhaimin, jumlah dokter ini masih jauh dari standar yang ditetapkan *World Health Organization (WHO)*. "Kalau ikut standar WHO seharusnya Indonesia punya dokter minimal 270 ribu orang. Sedangkan sekarang baru ada 146 ribuan. Jadi selain jumlah dokter kita masih kurang, ditambah lagi sebarannya tidak merata," ujar Gus

Muhaimin menutup keterangan tertulisnya.

uc/rdn

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar.



FOTO: PRIMA

Muhammad Toha Dorong Pemerintah Bahas Revisi UU Desa

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Toha mendorong pemerintah agar bersama-sama membahas revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasalnya, rencana revisi UU tersebut telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Periode 2019-2024. Hal ini, menurutnya, menjadi penting karena banyaknya aspirasi yang masuk, baik di daerah maupun melalui asosiasi-asosiasi kepala desa di Indonesia, untuk segera merevisi UU tersebut.

"Jadi Komisi II ini kan sudah menyampaikan kepada pemerintah. Kemarin sudah saya sampaikan juga kepada pemerintah bahwa ada aspirasi kepala desa semacam ini. DPR sudah berinisiatif untuk mengusulkan revisi itu tinggal bagaimana sekarang pemerintah," ujar Toha saat ditemui **Parlementaria** usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia dan Kades Indonesia Bersatu di Ruang Rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/).

Beberapa poin yang diusulkan revisi dalam RDPU ini adalah poin mengenai masa jabatan, tentang kedaulatan desa, dan moratorium. Terkhusus mengenai moratorium dan masa jabatan, Toha menganggap hal ini penting untuk memaksimalkan pembangunan di desa.

"Menurut saya, sepakat sekali dengan usulan kepala desa mengenai masa jabatan sembilan tahun itu karena agar mereka bisa bekerja. Karena setelah satu tahun itu biasanya masih melerai pertikaian, kemudian tahun kedua merencanakan pembangunan, tahun



FOTO: IKA/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Toha saat mengikuti RDPU dengan DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia dan Kades Indonesia Bersatu di Ruang Rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

ketiga hingga enam melakukan pembangunan, tahun ketujuh dan kedelapan sudah persiapan pemilihan kepala desa lagi. Menurut saya wajar, tetapi hanya dua periode. Sementara sekarang enam tahun tapi tiga periode. Nah kita sepakat dengan sembilan (tahun masa jabatan) tapi hanya dua periode," papar Politisi PKB ini.

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat komitmen pemerintah untuk membahas revisi UU Desa menjadi prioritas. Untuk itu, ia menyarankan kepada para kepala desa yang hadir agar menyampaikan aspirasi yang sama kepada

pemerintah dan mendesak pemerintah untuk menjadikan revisi UU Desa sebagai prioritas.

"Kemarin sudah diisyaratkan oleh Pak Tito (Mendagri) untuk menyegerakan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh para kepala desa melalui anggota DPR komisi II kemarin. Karena beberapa bulan yang lalu disampaikan aspirasi itu kepada kami, meski tidak secara tidak formal, itu kita sudah didatangi kepala desa agar begini-begitu (dilakukan revisi) dan sekarang diformulasikan dalam usulan kepala desa seluruh Indonesia," tutup Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

we/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Tahapan Pemilu 2024 Diharapkan Berjalan Baik Tanpa Gangguan

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung ingin memastikan semua tahapan pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan baik, dan tidak ada gangguan apapun, baik dari eksternal maupun internal. Termasuk dari internal institusi penyelenggara pemilu. Sebab publik menurutnya turut mencermati penyelenggaraan pemilu di tahun depan itu dan atensi masyarakat agar pemilu berkualitas sangatlah tinggi.

"Karena sangat tingginya atensi tersebut maka banyak rumor-rumor yang harus kita jawab. Kalau itu tidak ada masalah, ya sudah tidak perlu tidak kita bahas. Tapi kalau itu mengganggu kinerja masing-masing penyelenggara pemilu, maka tentu harus kita bahas bersama," ujar Doli saat membuka rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (11/1).

Atas dasar itulah, lanjut Doli, Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja, yang tidak lain ingin memastikan semua tahapan pemilu berjalan dengan baik, dan tidak ada gangguan apapun, baik dari eksternal maupun internal. Termasuk dari internal institusi penyelenggara Pemilu, serta isu-isu yang mengemuka di masyarakat.

"Itulah kenapa, teman-teman di DPR, khususnya di Komisi II bereaksi mengambil sikap setiap kali ada pernyataan-pernyataan yang tidak pada tempatnya. Konteksnya itu bukan karena hal-hal lain, namun

Ketua Komisi II DPR RI
Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

FOTO: AFR/PDT

”

KARENA SANGAT TINGGINYA ATENSI TERSEBUT MAKA BANYAK RUMOR-RUMOR YANG HARUS KITA JAWAB. KALAU ITU TIDAK ADA MASALAH, YA SUDAH TIDAK PERLU TIDAK KITA BAHAS. TAPI KALAU ITU MENGGANGGU KINERJA Masing-Masing PENYELENGGARA PEMILU, MAKA TENTU HARUS KITA BAHAS BERSAMA.

kita ingin proposional, kita ingin suasana kondusif, tidak menjadi polemik di publik. Dan kita juga perlu mengetahui per hari ini persiapan yang kita lakukan untuk pemilu di tahun 2024 dasar hukumnya adalah undang-undang nomor 7 Tahun 2017," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dengan kata lain, pihaknya tidak ingin ada asumsi-asumsi lain di luar yang sudah disepakati bersama dengan dasar hukum undang-undang tersebut. Pahalnya, jika ada asumsi lain di luar tersebut, maka semua rancangan yang dibuat atau disusun bersama sebelumnya itu hanya halusinasi. Sementara, hingga hari ini semua tahapan pemilu yang telah dilakukan sampai hari ini, semuanya memiliki dasar hukum yang jelas. — **ayu/aha**



Komisi II Pertanyakan Penguatan & Pengamanan Data Center Dukcapil

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mempertanyakan tentang

penguatan dan pengamanan data center yang ada pada Dukcapil (Kependudukan catatan sipil) Kementerian Dalam Negeri. Sebab data dari Dukcapil diketahui dipakai lebih dari 3.000 lembaga pemerintah dan swasta bahkan perbankan nasional.

"Tetapi pada tahun 2021 kalau kita masih ingat, saat itu data center *down* selama 2 hari. Dan semua kelabakan. Pertanyaan saya bagaimana kalau

”

TETAPI PADA TAHUN 2021 KALAU KITA MASIH INGAT, SAAT ITU DATA CENTER DOWN SELAMA 2 HARI. DAN SEMUA KELABAKAN. PERTANYAAN SAYA BAGAIMANA KALAU INI TERJADI KETIKA PEMILU. APAKAH DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SUDAH MEMPUYAI SATU KONSEP DALAM RANGKA PENGUATAN DAN PENGAMANAN DATA CENTER SERTA PENGAMANAN DATANYA.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Junimart Girsang.

ini terjadi ketika pemilu. Apakah dari Kementerian Dalam negeri sudah mempunyai satu konsep dalam rangka penguatan dan pengamanan data center serta pengamanan datanya," tanya Junimart dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (11/1).

Dilanjutkan Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini, jika hal itu terjadi maka sangat fatal dan vital akibatnya. Oleh karena itu ia merasa perluantisipasi agar hal serupa tidak terjadi. Dengan kata lain perlu penguatan dan pengamanan data center di Dukcapil.

Tidak hanya itu, Junimart juga mempertanyakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang akan menjadi pintu utama untuk bisa memilih. Pasalnya, selama ini ada dua jenis KTP di Indonesia, pertama KTP yang berwarna biru muda yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, serta KTP berwarna *orange* untuk warga asing.

Ia berharap agar kedua jenis KTP tersebut dikomunikasikan oleh Kemendagri ke KPU dan Bawaslu. "Di Indonesia ini banyak orang asing yang punya KTP, dia punya NIK walaupun dikatakan orang asing. Dan walaupun secara undang-undang dikatakan Warga Negara Asing, tetapi kalau dia punya KTP bagaimana ceritanya ini? Ini harus disosialisasikan kepada TPS dan KPPS," tanya Junimart.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: AFR/IDT

Negara Wajib Penuhi Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai pengakuan negara atas terjadinya 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat merupakan batu pijakan untuk menunaikan kewajiban negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak-hak korban. Taufik menegaskan, pengakuan tersebut mesti diikuti dengan rasa penyesalan mendalam atas kesalahan negara yang telah dibuat di masa lalu. Sehingga pengakuan itu membuka pintu untuk mengungkapkan fakta kebenaran atas peristiwa-peristiwa tersebut.

kehidupan bernegara karena negara telah mengakui adanya kesalahan di masa lalu yang menjadi catatan kelam dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa. Mengusut pelaku dan melakukan penegakan hukum, mengidentifikasi korban serta memulihkan dan memenuhi hak-hak korban, melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan, hukum dan institusi untuk mencegah berulangnya peristiwa tersebut di masa mendatang," ungkap Taufik dalam keterangan tertulisnya yang dikutip **Parlementaria**, Jumat (13/1).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengatakan, langkah-langkah tersebut dinilai wajib dilakukan.

HAM merupakan salah satu janji politik Presiden Joko Widodo sejak 2014. "Dalam waktu dekat saya berharap pemerintah sudah memiliki program-program tindak lanjut secara sistematis, terukur, realistis dan komprehensif termasuk dalam hal penganggarannya dalam APBN ke depan," tambah Taufik.

Taufik juga mengatakan, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi negara dalam memenuhi kewajiban terhadap pelanggaran HAM. Di antaranya, jaminan akses keadilan bagi para korban. Selanjutnya, pemulihan yang layak bagi korban yaitu pada aspek restitusi keadaan korban sebelum peristiwa terjadi, kompensasi penggantian kerugian korban yang dapat diperhitungkan dengan nilai ekonomis, dan pemulihan martabat korban.

"Dengan melakukan langkah-langkah serius membuka fakta, meminta maaf secara publik, membuat simbol peringatan seperti monumen dan sebagainya," ujar Legislator Dapil Lampung I ini. Selain itu, kata Taufik lagi, pemerintah harus memberi jaminan informasi yang relevan bagi korban atau keluarga. Akses informasi tersebut meliputi fakta peristiwa yang terjadi dan mekanisme pemulihan yang disiapkan oleh negara.

Dikatakan pula bahwa pemerintah memang berupaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan non yudisial, namun hal itu tidak boleh menutup penyelesaian secara yudisial. "Penanganan non yudisial dengan penanganan yudisial harus bersifat komplementer, saling melengkapi, dan bukan substitusi, saling menggantikan," kata Taufik.

Anggota Komisi III DPR RI
Taufik Basari.



FOTO: JKA/PDT

we/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Legislator Dorong Komisi Yudisial Berantas Peradilan Sesat

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan meminta Komisi Yudisial (KY) mengawasi hakim yang bekerja tidak profesional. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan rambu dan menjadikan para hakim selalu terawasi dengan baik. Dengan begitu mereka terdorong untuk selalu bekerja dengan baik.

"Jika masyarakat menemukan ada hakim yang tak wajar, maka laporkan saja ke KY," tandas Hinca dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, Kamis (12/1). Anggota Dewan dari Dapil Sumatera Utara III ini mendapatkan informasi ada tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Simalungun dilaporkan ke KY.

Mereka adalah Aries Kata Ginting, Dessy Deria Elisabet Ginting, dan Yudi Dharma. Ketiga hakim itu dilaporkan



Anggota Komisi III DPR RI
Hinca Panjaitan.

FOTO: JKA/PDT



JIKA MASYARAKAT MENEMUKAN ADA HAKIM YANG TAK WAJAR, MAKA LAPORKAN SAJA KE KY. KY SEGERA MENINDAKLANJUTI PELAPORAN TERSEBUT SECARA TRANSPARAN. AGAR PELAPOR HARUS MENYAMPAIKAN BUKTI YANG DIPERLUKAN OLEH TIM DI KY. SUPAYA TIDAK ADA FITNAH.

ke KY oleh pelapor Sahat M karena diduga tidak profesional sehingga diduga menggelar peradilan sesat. "Jika ada masyarakat pencari keadilan merasakan tidak pas tempat pengaduannya memang ke KY," ungkap Hinca.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini meminta KY segera menindaklanjuti pelaporan tersebut secara

transparan. Dia juga mengatakan agar pelapor harus menyampaikan bukti yang diperlukan oleh tim di KY. "Supaya tidak ada fitnah," ujar Hinca.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengungkapkan pelaporan tiga hakim ke KY itu sudah tepat. "Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan hakim jika dinilai melakukan pelanggaran kode etik,"

ujar Santoso. Bahkan, apabila terbukti bersalah, menurut Santoso, sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap hakim ialah pemberhentian. "Sanksi yang dijatuhkan (pemberhentian)," tutup Santoso.

Pelapor bernama Sahat M melaporkan tiga hakim PN Simalungun ke KY pada Selasa, 29 November tahun lalu. Ketiga hakim tersebut dilaporkan ke KY karena diduga tidak profesional sehingga menggelar peradilan sesat.

Saat ini, di [website](https://www.komisiyudisial.go.id) Komisi Yudisial, [pelaporan.komisiyudisial.go.id](https://www.komisiyudisial.go.id), status laporan tersebut sudah dalam tahap Pemeriksaan. Status Pemeriksaan di [website](https://www.komisiyudisial.go.id) itu merupakan kelanjutan dari tahapan Verifikasi pada 21 Desember 2022 dan per 3 Januari 2023 sudah berkembang menjadi Pemeriksaan. **ssb/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Andi Akmal Soroti Minimnya Porsi Anggaran Irigasi Pertanian di Kementan

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti minimnya alokasi anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian Tahun 2023 sebesar Rp3.100.741.155.000. Alokasi anggaran Ditjen PSP itu dipandang minim jika dibandingkan dengan alokasi anggaran di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp15,5 triliun.

"Ditjen PSP ini kan ada program pembangunan irigasi tersier. Anggarannya kecil, tapi mestinya volumenya banyak. Seharusnya, anggaran pembangunan irigasi ini tidak lebih kecil dari anggaran bendungan PUPR yang sebesar Rp15,5 triliun. Namun kenyataannya, Pengelolaan air irigasi pertanian yang semula Rp905,7 miliar malah turun Rp736,53 miliar," kata Andi dalam keterangan persnya yang diterima **Parlementaria** pada Rabu (11/1).

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan untuk tercapainya ketahanan pangan nasional sebagai kunci untuk menghadapi ancaman krisis pangan. Namun menurut Andi, upaya menuju pembangunan pangan yang kokoh di tanah air ini masih jauh dari harapan. Hal itu dibuktikan dengan pembangunan bendungan yang terus berjalan hingga 61 (enam puluh satu) titik bendungan yang menjadi terobosan pengelolaan sumber daya air yang dinilai belum cukup.

Menurut Politisi Fraksi PKS itu sumber daya air bukan hanya untuk kebutuhan air minum, dan kebutuhan hajat hidup orang banyak, melainkan juga menjadi penopang utama sarana pendukung pertanian. Untuk itu, keterjangkauan pengairan yang baik bagi lahan pertanian yang banyak tersebar, juga memerlukan prioritas dalam sistem pengairannya. Hal itu, lanjutnya, akan dapat dipenuhi dengan irigasi tersier.

Andi Akmal pun mempertanyakan komitmen pemerintah untuk merealisasikan ketahanan pangan nasional dengan politik anggaran yang kurang proporsional terhadap alokasi belanja anggaran untuk mendukung pertanian. Meskipun

pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Indonesia sebesar Rp95 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pada kenyataannya, alokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 hanya sebesar Rp15.318.655.827.000.

"Sudah saatnya pemerintah berpikir, agar mayoritas alokasi anggaran ketahanan pangan Indonesia yang sebesar Rp95 triliun ini ada di Kementan. Bila masih pada kondisi saat ini, akan menjadi bukti bahwa pemerintah masih belum serius menjadikan negara ini memiliki kekuatan pangan yang tangguh secara substansial," tegas Legislator Dapil Sulawesi Selatan II itu. [gal/rdn](#)



FOTO: ARF/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.



Suryadi Jaya Sesalkan Tambahan PMN Rp3,2 T untuk Proyek KCJB

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyesalkan adanya tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Suryadi menjelaskan, total PMN Rp7,3 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk proyek KCJB ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Adapun SAL itu berasal dari sisa anggaran Kementerian yang tidak direalisasikan 100%.

Misalnya, kata Suryadi, realisasi anggaran Kementerian PUPR pada 2021 hanya sebesar 94,5% dan Kemenhub hanya merealisasikan sebesar 97,19%. "Kami prihatin dengan pemberian PMN ini, dimana pemerintah telah ingkar janji untuk tidak menggunakan APBN dalam membiayai proyek KCJB. Dana-dana ini seharusnya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, namun tidak bisa terserap dan kemudian malah dialihkan untuk proyek yang belum jelas keuntungannya" ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip **Parlementaria** beberapa hari yang lalu.

Karena itu, Suryadi mendorong agar pemerintah kembali menghitung manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan menambal pembengkakan biaya proyek KCJB dari dana SAL. Musababnya, menurut data Kementerian Keuangan tercatat 74,4% BUMN yang diguyur PMN justru hasil ekuitasnya di bawah biaya utang.

Suryadi memaparkan, sejumlah alasan yang membuat penambahan PMN untuk proyek KCJB cenderung sia-sia. Berdasarkan perhitungan KCIC, balik modal proyek KCJB baru



Anggota Komisi V DPR RI
Suryadi Jaya Purnama.

FOTO: AFR/PDT

akan terjadi di tahun 2061 atau 38 tahun sejak mulai beroperasi di tahun ini. Perhitungan itu dengan asumsi harga tiket Rp 350 ribu, dan rata-rata mengangkut 30 ribu penumpang per harinya. "Kami melihat asumsi ini super optimis, sebab diperkirakan akan sulit meraih penumpang sebanyak itu jika jaraknya pendek," ucap Politisi Fraksi PKS ini.



**OPTIMISME BERLEBIH
TERKAIT PROYEK
KCJB SUDAH TERJADI
SEJAK AWAL, YAKNI
SAAT COST OVERRUN
SEBESAR US\$1,449
MILIAR ATAU RP21,74
TRILIUN...**

Selain itu, alasan lainnya yang membuat proyek KCJB semakin tidak kompetitif, yaitu masih banyaknya moda transportasi alternatif lainnya yang dinilai lebih murah untuk mencapai Bandung. Lebih-lebih, kata Suryadi, stasiun akhir KCJB juga bukan ada di pusat kota Bandung, melainkan di Stasiun Padalarang. Hal itu dapat membuat masyarakat berpikir ulang untuk memilih KCJB sebagai transportasi menuju Bandung.

Menurut Suryadi, optimisme berlebihan terkait proyek KCJB sudah terjadi sejak awal, yakni saat *cost overrun* sebesar US\$1,449 miliar atau Rp21,74 triliun. Hal itu terjadi lantaran pemerintah salah perhitungan karena terlalu optimis. "Kita minta agar pemberian PMN ini benar-benar dihitung secara tepat manfaat ekonominya, jangan sampai malah memberikan dampak negatif yang luas dari menyelamatkan proyek KCJB yang sejak awal sudah salah perhitungan ini," imbuhnya. **we/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta Perlu Ditinjau Ulang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mewacanakan penerapan jalan berbayar atau *Electronic*

Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota. Usulan ini sendiri dipilih guna mengurai kemacetan yang parah setiap harinya di ibu kota Jakarta.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid membeberkan sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam penerapan jalan berbayar atau ERP di 25 ruas jalan ibu kota. "Apakah tujuannya untuk mendorong tata lingkungan dan mendorong transportasi publik atau hanya sekedar mengejar pendapatan yang berarti berorientasi pendapatan," kata Anwar Hafid dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, Kamis (12/1).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai, bila tujuan dari penerapan jalan berbayar tersebut hanya sekedar untuk mengejar pendapatan daerah maka hal itu akan memberatkan masyarakat Jakarta. "Jika itu tujuannya tentu akan memberatkan publik," katanya.

Ia menyarankan, agar kebijakan yang menarik dan menambah beban hidup masyarakat sebaiknya dapat ditinjau kembali. Pasalnya, kata dia, kebijakan itu memiliki konsekuensi meningkatkan kebutuhan masyarakat di tengah ancaman krisis global yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini.

Menurut dia, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pembenahan serius guna mengurai kemacetan di ibu kota dengan mendukung program transportasi publik. "Perlu pembenahan dan perlu keseriusan dalam mendukung program *mass transport*, utamanya

Anggota Komisi V DPR RI
Anwar Hafid.

FOTO: MRP/PDT

”

**APAKAH TUJUANNYA
UNTUK MENDORONG
TATA LINGKUNGAN
DAN MENDORONG
TRANSPORTASI
PUBLIK ATAU HANYA
SEKEDAR MENGEJAR
PENDAPATAN
YANG BERARTI
BERORIENTASI
PENDAPATAN**

lewat program pengurangan transportasi pribadi yang masuk ke isu *green energy*," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah ruas jalan di Jakarta akan diberlakukan ERP atau jalan berbayar. Tujuan diberlakukan ERP diyakini guna mengurai kemacetan yang kian parah setiap harinya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputan memastikan pemberlakuannya masih menunggu pembahasan rancangan peraturan daerah. Saat ini, Dishub DKI Jakarta masih membahas rancangan peraturan daerah terkait ERP bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta.

ann/aha



Apresiasi Terhadap BUMN Karya yang Berkontribusi Besar Bagi Pembangunan IKN

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadama Rudana menuturkan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memiliki kontribusi besar bagi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang saat ini tengah dibangun. Hal itu diungkapkan Putu saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi BUMN yang bertajuk "BUMN Karya Memberikan Kontribusi Dalam Pembangunan IKN", di Provinsi Bali.

Putu mengatakan, pembangunan IKN Nusantara merupakan upaya Pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. "IKN Nusantara sekaligus simbol identitas bangsa, *green economy, green energy, smart transportation*, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai *milestone* transformasi besar bangsa Indonesia," ujar Putu dalam keterangan pers rilis yang diterima **Parlementaria**, Selasa (17/1).

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan ADHI mendapatkan tanggung jawab sebagai kontraktor yang turut berkontribusi

dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sampai dengan saat ini, ADHI telah memperoleh 4 kontrak pembangunan infrastruktur IKN Nusantara, antara lain 22 tower untuk Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Pelindung *Fender* Jembatan Pulau Balang, Jalan Tol Seksi 3A Segmen Karangjoang-KTT Kariangau, dan terbaru, ialah Rumah Tapak Kedinasan di IKN Nusantara.

Pada proses pelaksanaannya, lingkup pekerjaan ADHI meliputi, perencanaan dan perancangan, pekerjaan konstruksi dan infrastruktur kawasan, seperti rumah tapak, penataan kawasan untuk fasilitas umum dan sosial, serta prasarana dan sarana kawasan. "Selain itu, dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan tentu diharapkan perseroan juga memberikan



BUMN KARYA MEMBERIKAN KONTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN IKN

Anggota Komisi VI DPR RI
Putu Supadama Rudana.



manfaat bagi pemerintah, negara dan masyarakat, salah satunya, melalui peningkatan PDB/PDRB, penambahan lapangan kerja, peningkatan pajak dan dividen," tutup Putu.

Saat ini, ADHI juga tengah mengerjakan Hunian Pekerja Konstruksi di IKN. Pembangunan ini menggunakan Teknologi Modular yang merupakan karya anak bangsa, Konstruksi Rumah Susun dengan menerapkan teknologi fabrikasi hunian modular dapat membuat proyek hunian untuk pekerja Konstruksi lebih cepat dibangun serta layak huni.

tn/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: RSB/PDT

Nurhasan Zaidi Nilai K3 Perusahaan Smelter Nikel di Morowali Lemah

Anggota Komisi VII DPR RI
Nurhasan Zaidi.

Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi mengatakan pengelolaan dan pemurnian (*smelter*) nikel yang dimiliki PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), yang merupakan perusahaan besar, masuk dalam proyek strategis nasional sudah seharusnya menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Namun pada kenyataannya penerapan K3 di perusahaan ini sangat lemah. Padahal seperti diketahui, PT GNI yang merupakan Pabrik Pengelolaan dan Pemurnian (*smelter*) nikel merupakan proyek besar yang bernilai Rp27 triliun.

"Saya melihat proyek PT GNI yang sudah berjalan tiga tahun seharusnya progresnya sudah lebih rapi dan cepat, terutama terkait persoalan K3 yang lemah, sehingga mengakibatkan adanya insiden hingga merenggut nyawa dua pegawainya. Oleh sebab itu sudah seharusnya proyek industri dengan nilai triliunan bisa lebih baik lagi kedepannya," demikian diungkapkannya usai melakukan peninjauan lapangan ke Smelter II,

PT GNI, Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (4/1).

Lanjut Politisi PKS menilai dari hasil pertemuan hari ini, antara Tim Kunjungan Komisi VII dan jajaran pihak GNI tidak komprehensif, seharusnya pihak GNI paparkan secara transparan apa yang terjadi seutuhnya dalam insiden kebakaran yang mengakibatkan adanya dua nyawa yang hilang. Dengan demikian diusulkan dalam pertemuan agar dibuatkan Panitia Kerja (Panja) agar bisa dilakukan pendalaman.

"Saya menilai paparan daripada pihak GNI tidak menjawab secara

komprehensif, untuk itu Komisi VII mengusulkan adanya Panitia Kerja (Panja) agar insiden yang terjadi pada Desember 2022 lalu, memiliki titik temu. Apa yang menjadi penyebab dari pada kebakaran tersebut," jelasnya.

Ia pun menambahkan seharusnya perusahaan yang sudah ditunjuk pemerintah sebagai proyek strategis nasional, dimana, pada hakikatnya kawasan industri yang diinginkan pemerintah, memiliki kawasan industri hijau dan juga penataan rapih. "Pada kenyataannya di sini tidak sesuai yang diinginkan pemerintah, sangat tidak layak seperti yang kita lihat hari ini, perlu adanya perbaikan," sebutnya.

Sementara itu Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IX ini mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dua pegawai yang menjadi korban pada insiden kebakaran, yaitu Nirwana Selle dan I Made Defri Hari Jonathan yang bekerja di bawah Departemen Smelter Produksi PT GNI Morowali Utara. **rni/aha**

FOTO: RSB/PDT



”

SAYA MELIHAT PROYEK PT GNI YANG SUDAH BERJALAN TIGA TAHUN SEHARUSNYA PROGRESNYA SUDAH LEBIH RAPI DAN CEPAT, TERUTAMA TERKAIT PERSOALAN K3 YANG LEMAH, SEHINGGA MENGAKIBATKAN ADANYA INSIDEN HINGGA MERENGGUT NYAWA DUA PEGAWAINYA.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kuota Haji Naik, Lisda Minta Pemerintah Beri Pelayanan Terbaik

Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyambut baik kesepakatan Arab Saudi-Indonesia terkait kuota haji dan umrah Indonesia pada 2023 yang mencapai 221.000 jemaah. Sebelumnya Indonesia hanya mendapat kuota 100.051 jemaah. Jumlah itu karena masih ada pandemi Covid-19.

"Kuota haji Indonesia tahun ini terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus, dengan total 221.000 sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Kita menyambut baik, karena setiap penambahan kuota tentunya sedikit berdampak terhadap antrian calon jemaah haji Indonesia," ujar Lisda melalui rilis yang diterima **Parlementaria**, Selasa (10/1).

Pernyataan Lisda tersebut menanggapi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah yang telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Salah satu poinnya, disepakati kuota haji Indonesia 2023 mencapai 221.000 jemaah.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu berharap penambahan kuota tersebut terus terjadi, untuk mengurangi antrian calon jemaah haji, yang bertambah panjang karena terhalang pandemi. Lisda juga meminta pemerintah dapat mengelola teknis pelaksanaan haji secara profesional, dan tidak mengurangi standar pelayanan haji yang sudah dinilai cukup baik pada tahun sebelumnya.

"Dengan adanya ini (kesepakatan kuota), tentu perlu adanya persiapan yang lebih matang baik secara teknis pemberangkatan maupun pelayanan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni.



FOTO: JKA/PDT

Jangan nanti, pelayanan yang sudah dinilai cukup baik, malah menurun karena adanya penambahan kuota ini," kata Lisda.

Dia menambahkan adanya kesepakatan tidak adanya batasan usia bagi calon jemaah haji, maka, pelayanan terhadap jemaah haji

manula harap disiapkan dengan hati-hati. Pemerintah harus segera mempersiapkan segala sesuatunya jauh hari. Terkait dengan penentuan calon jemaah haji (CJH) yang akan diberangkatkan tahun ini, Lisda kembali menegaskan agar semuanya berjalan sesuai dengan antrian dan dilakukan secara transparan dengan sosialisasi dan komunikasi yang baik kepada para CJH.

"Semuanya harus dilakukan secara transparan, sehingga tidak ada manipulasi data daftar CJH yang berangkat, atau nama-nama titipan. Jangan sampai ada calon jemaah haji yang komplain dan merasa dianaktirikan, terutama mereka yang tidak masuk dalam kuota 221.000 orang. Pemerintah juga harus menyosialisasikan hal tersebut," tandas Lisda. rnm/aha

**”
SEMUANYA HARUS
DILAKUKAN SECARA
TRANSPARAN,
SEHINGGA TIDAK ADA
MANIPULASI DATA
DAFTAR CJH YANG
BERANGKAT, ATAU
NAMA-NAMA TITIPAN.**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pemerintah Harus Awasi Jajanan Mengandung Zat Berbahaya

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher meminta pemerintah mengawasi langsung peredaran jajanan 'Chiki Ngebul' yang membuat beberapa anak keracunan akibat mengandung nitrogen cair. Ia mengatakan, penggunaan bahan berbahaya nitrogen cair pada makanan berisiko bagi tubuh, terutama untuk anak-anak.

Karenanya, Pemerintah harus turun ke lapangan melakukan pengawasan agar penggunaan nitrogen cair pada makanan tidak dilakukan secara sembarangan dan bebas. "Pengawasan ini penting karena anak-anak tidak tahu dan tidak mengerti mana yang baik dan mana yang berbahaya bagi kesehatan. Anak-anak umumnya tertarik pada warna, bentuk atau keunikan makanan. Kita khawatir ada jenis jajanan lain yang juga mengandung zat berbahaya bagi tubuh," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/1).

Sebagaimana diberitakan, ada 24 anak di Tasikmalaya dan 4 anak di Bekasi yang dilaporkan keracunan makanan yang diduga berasal dari jajanan Chiki Ngebul. "Pemerintah dalam hal ini BPOM perlu sidak ke lapangan karena sebagian besar pedagang Chiki Ngebul itu pasti tidak tahu bahaya dari nitrogen cair yang dicampur dalam makanan. BPOM harus melakukan edukasi kepada para pedagang agar tidak memasukkan zat-zat bahaya ke dalam makanan," ungkap Netty.

Menurutnya, penggunaan nitrogen cair dalam makanan sebagaimana saran dari para pakar

”

SOSIALISASI TENTANG MAKANAN YANG AMAN DAN SEHAT HARUS TERUS DI-UPDATE KARENA JENIS DAN VARIANNYA SELALU BERKEMBANG. JANGAN SAMPAI SETELAH ADA KEJADIAN DAN JATUH KORBAN, PEMERINTAH BARU SIBUK MENGELUARKAN PERINGATAN.

Anggota Komisi IX DPR RI
Netty Prasetyani Aher.

kesehatan harus dilakukan oleh *chef-chef* bersertifikat, tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Netty juga meminta agar BPOM melakukan sosialisasi efektif kepada orang tua, guru dan tokoh masyarakat terkait zat-zat yang berbahaya dalam makanan, serta berpartisipasi dalam pengawasan di lingkungan.

"Sosialisasi tentang makanan yang aman dan sehat harus terus di-update karena jenis dan variannya selalu berkembang. Jangan sampai setelah ada kejadian dan jatuh korban, pemerintah baru sibuk mengeluarkan peringatan," katanya.

aan/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: MRI/PDT

DPR Punya Hak untuk Tentukan Sikap Pada Perppu Cipta Kerja

Polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Ciptaker) masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Pasalnya peraturan itu menjadi penting karena mempengaruhi banyak hal di masyarakat, yakni terkait dengan kalangan kelas pekerja.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, DPR hanya mempunyai hak menentukan sikap terkait keberadaan Perppu Ciptaker. "Kalau kita bicara perppu, DPR itu tidak punya hak untuk membahas sebetulnya. Kita hanya bisa menolak atau menerima," kata Charles ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).

Saat ini sejumlah pihak mengajukan permohonan gugatan terhadap Perppu Ciptaker ke MK. Dalam surat permohonan yang diterima oleh MK pada 5 Januari 2022 disebutkan para pemohon mengalami kerugian berupa ketidakpastian hukum setelah Perppu itu keluar.

Akan tetapi, Perppu Ciptaker disebut tetap sah dan mengikat setelah diumumkan pemerintah kepada masyarakat. Maka dari itu saat ini penentuan ada di tangan DPR. Jika disetujui DPR maka Perppu Ciptaker sah menjadi Undang-Undang. Akan tetapi jika DPR menolak maka Presiden Joko Widodo wajib mencabut Perppu itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perppu Cipta Kerja pada

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Charles Honoris.

FOTO: MRI/PDT



Jumat (30/12/2022) menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada November 2021 lalu sesuai putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

”

KALAU KITA BICARA PERPPU, DPR ITU TIDAK PUNYA HAK UNTUK MEMBAHAS SEBETULNYA. KITA HANYA BISA MENOLAK ATAU MENERIMA.

MK menilai, metode penggabungan atau *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau melakukan revisi. Mahkamah juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU.

Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan, UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan. Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. **ssb/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Bramantyo Sepakat Usulan Perubahan Regulasi PSSI terkait Komite Suporter

Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo sepakat dengan usulan perubahan regulasi PSSI ke depan, khususnya terkait dengan pembentukan Komite Suporter sepak bola Indonesia. Usulan dibentuknya komite suporter berangkat dari kritik para pecinta sepak bola kepada PSSI selaku induk dari organisasi sepak bola Indonesia yang dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada suporter.

"Pada dasarnya saya sepakat adanya perubahan regulasi, jika hal itu membawa perubahan yang lebih baik bagi sepak bola di Indonesia," kata Bramantyo dalam keterangan yang diterima tim **Parlementaria**, Minggu (8/1). Untuk itu, lanjutnya, usulan dibentuknya Komite Suporter ini didukung oleh komisi X, asalkan melibatkan pemerintah dan organisasi suporter di Indonesia.

Konsekuensinya, pada momentum Kongres Luar Biasa (KLB) nanti harus perubahan Statuta PSSI dengan menambahkan satu Komite, yakni Komite Suporter. "Perubahan regulasi yang dilakukan harus melibatkan dan menampung aspirasi dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan organisasi-organisasi suporter di Indonesia," ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga meminta PSSI harus komitmen dengan regulasi baru nanti, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan regulasi yang ada. Dirinya optimis, para suporter, baik timnas Indonesia maupun klub bisa

menghasilkan energi positif untuk sepak bola tanah air lewat adanya pembentukan Komite Suporter. Hal itu menurutnya sesuai dengan keresahan bersama pecinta sepak bola Indonesia saat ini.

"Sepak bola adalah olahraga yang paling banyak digemari di Indonesia.

”
UNTUK
MENCIPTAKAN
EKOSISTEM
KEOLAHRAGAAN
YANG BAIK,
TERUTAMA
TERKAIT DENGAN
SUPORTER ADALAH
TANGGUNG JAWAB
DARI BERBAGAI
PIHAK.

Anggota Komisi X DPR RI
Bramantyo Suwondo.

Oleh karenanya, peran antara suporter dan sepak bola tidak dapat dipisahkan. Untuk menciptakan ekosistem keolahragaan yang baik, terutama terkait dengan suporter adalah tanggung jawab dari berbagai pihak," sambungnya.

Dikatakan Bramantyo, landasan hukum mengenai kegiatan serta hak dan kewajiban suporter selama ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Untuk itu, Pemerintah dan khususnya PSSI perlu melakukan sosialisasi terstruktur terkait peraturan ini dan segera menyusun peraturan turunan UU tersebut. "Regulasi terkait suporter juga harus disosialisasikan dan dikomunikasikan secara intensif kepada semua organisasi suporter sepakbola

di semua tingkatan liga," tutupnya.

— hal/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: DEP/PTT

Rano Karno Harap Perpustakaan Jadi Etalase Budaya Daerah



Anggota Komisi X DPR RI
Rano Karno.

FOTO: DEP/PTT

Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno berharap Perpustakaan Daerah (Perpusda) di Indonesia selain sebagai pusat literasi juga dapat menjadi etalase budaya bagi masing-masing daerah. Menurutnya, perpustakaan bukan hanya berisi karya-karya tertulis, tetapi juga karya-karya tersirat seperti kebudayaan.

"Kebetulan saya sekretaris di Badan Kebudayaan Nasional mengharapkan Perpustakaan itu menjadi etalase budaya, karena Perpustakaan itu ada yang tertulis dan ada yang tersirat. Jadi ini yang harus mulai kita ciptakan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di

Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).

Lebih lanjut, Anggota DPR yang juga seorang sineas ini menilai, pengembangan perpustakaan digital juga perlu untuk terus didorong. Sebab, perkembangan digitalisasi merupakan suatu hal yang tak dapat dihindari. Sehingga, perpustakaan juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. "Dunia maya itu tidak bisa kita hindari, harus kita masuki. Nah ini fisik (bangunan perpustakaan) bagus, namun apakah digital di wilayah ini semuanya sudah merata," imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya mengapresiasi capaian realisasi anggaran Perpustakaan tahun 2022 serta mendukung penuh penambahan anggaran bagi Perpustakaan Nasional agar keberadaan

perpustakaan-perpustakaan di berbagai wilayah di Indonesia dapat terealisasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan literasi masyarakat Indonesia.

"Saya *surprise* sekali dari pagu (anggaran tahun 2022) itu realisasinya 98 persen. Ini jarang sebuah lembaga bisa mencapai ini. Harusnya kita berjuang lagi untuk menambah anggarannya, supaya perpustakaan di beberapa wilayah bisa terealisasi, terbangun lagi, karena kalau kita beranggapan pustakawan tidak diperlukan, mati negeri ini," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. Diketahui realisasi anggaran Perpustakaan tahun 2022 per 31 Desember 2022 adalah sebesar 98,41 persen atau sebesar Rp649 miliar dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp660 miliar. **— bia/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



RUU Kesehatan Harus Selaras Dengan Tujuan Pembentukan Politik Kesehatan Indonesia

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sondang Tampubolon mewanti-wanti agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan selaras dengan tujuan pembentukan politik kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, usul Sondang, penyusunan RUU Kesehatan harus dipikirkan dari hulu hingga ke hilir terlebih RUU tersebut dalam penyusunannya menggunakan metode *omnibus law*.

"Penyusunan RUU Kesehatan seharusnya juga membentuk politik kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, dalam menyusunnya harus dari hulu sampai hilir karena metodenya *omnibus law*. Sebaiknya memang harus dipikirkan dari mulai aspek tenaga kesehatan, tenaga medis serta sarana prasarana seperti penggunaan alat, obat-obatan sampai jaminan kesehatan," ujar Sondang saat Rapat Pleno Baleg DPR RI dalam rangka Penyusunan RUU Tentang Kesehatan di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut lebih lanjut menyoroti terlampau panjangnya tahapan regulasi yang harus dilalui oleh tenaga kesehatan dalam memperoleh izin praktek di Indonesia selama ini. Terkait hal itu, Sondang mengusulkan agar dalam salah satu pasal RUU Kesehatan nantinya berisi aturan mempersingkat tahapan regulasi yang harus dilalui tenaga kesehatan dalam memperoleh izin praktek. Mengingat, saat-saat ini Indonesia tengah dalam situasi darurat Sumber Daya Manusia.

Berkaca selama ini, ungkap Sondang, bagi seorang tenaga kesehatan khususnya dokter untuk bisa berpraktek di Indonesia maka langkah pertama yang harus ditempuh lulus S.Ked. Kemudian, harus melaksanakan *Co-Ass (Co-Assistant)* selama dua tahun dan selanjutnya *internship*. Berikutnya, harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat. Tak sampai disitu, harus bisa mendapatkan rekomendasi daripada profesi,

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
Sondang Tampubolon.

FOTO: DEP/POI

”
**PENYUSUNAN
RUU KESEHATAN
SEHARUSNYA JUGA
MEMBENTUK POLITIK
KESEHATAN INDONESIA.
OLEH KARENA ITU,
DALAM MENYUSUNNYA
HARUS DARI HULU
SAMPAI HILIR KARENA
METODENYA OMNIBUS
LAW.**

harus mendapatkan STR hingga akhirnya mendapatkan surat izin praktek.

"Itu langkahnya terlalu panjang. Kenapa kita tidak menciptakan supaya regulasi itu bisa lebih singkat, mengingat saat-saat ini Indonesia sedang darurat Sumber Daya Manusia. Kenapa ini tidak bisa dipersingkat atau disederhanakan? Misalnya, untuk tenaga kesehatan mendapatkan SIP maka cukup sudah dalam memperoleh SIP dan STR itu digabungkan menjadi satu sehingga bisa menyederhanakan regulasi," tandas Legislator Dapil DKI Jakarta I ini. **pun/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Luluk Hamidah Desak RUU PRT Segera Disahkan Jadi RUU Usul Inisiatif DPR

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah mendesak agar Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) bisa segera disahkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Hal ini dimaksudkan agar RUU ini bisa segera dibahas dengan Pemerintah maupun masukan-masukan dari berbagai pihak baik yang mendukung maupun yang masih memberikan catatan-catatan bisa menjadi masukan yang berarti dalam pembahasan RUU Ini.

"Kita mendesak kepada Pimpinan DPR agar RUU PRT ini bisa disahkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR

sehingga ada kesempatan bagi kita dan juga pemerintah untuk membahas bersama sama. Sehingga semua asumsi kekhawatiran atau bahkan pertanyaan-pertanyaan yang



ADA RELASI KUASA YANG SANGAT TIMPANG ANTARA PRT DAN JUGA MAJIKAN ATAU PEMBERI KERJANYA, KEMUDIAN BELUM LAGI SITUASI YANG SANGAT EKSPLOITATIF, JUGA PRAKTEK PERBUDAKAN MODERN ITU JUGA MASIH BANYAK TERJADI TERMASUK JUGA KEKERASAN DAN HAL-HAL LAIN.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah.

menjadi beban di kepala sebagian orang yang terkait RUU ini itu bisa menjadi masukan yang berarti," ungkap Luluk, usai menghadiri sosialisasi Baleg DPR RI terkait Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Senin (16/1).

Lebih lanjut, Luluk jelaskan bahwa sebenarnya RUU PRT ini bukan hanya mengatur yang terkait dengan PRT-nya itu sendiri, tapi bahkan yang diatur itu cukup banyak. Misalkan tentang penyalur kerja, atau kemudian lembaga penyalur, kemudian juga hak-hak kewajibannya pemberi kerja atau majikannya termasuk juga peran serta masyarakat.

"Ada relasi kuasa yang sangat timpang antara PRT dan juga majikan atau pemberi kerjanya, kemudian belum lagi situasi yang sangat eksploitatif, juga praktek perbudakan modern itu juga masih banyak terjadi termasuk juga kekerasan dan hal-hal lain. Tidak mempunyai jaminan sosial, tidak ada BPJS, tidak ada Jamsostek, tidak ada THR, tidak ada subsidi upah seperti yang dinikmati oleh misalnya para buruh atau pekerja. Nah PRT ini *zonk* gitu, jadi kehadiran negara benar-benar dirasakan tidak ada bagi perlindungan PRT itu," ungkap Luluk.

Sebagaimana diketahui bahwa RUU PRT ini sudah lebih dari 18 tahun dan di Baleg sebenarnya juga sudah diselesaikan pembahasan harmonisasi dan sinkronisasi dan sudah mendapatkan persetujuan dari 7 berbanding 2 fraksi yang sepakat agar RUU ini bisa dinaikkan dan diambil keputusan di rapat paripurna sehingga bisa menjadi RUU inisiatif DPR. 🐼

skr/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: SKR/PDT

Sosialisasi Prolegnas untuk Bangun Komunikasi Konstruktif

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sedang giat menyosialisasikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) kepada masyarakat luas termasuk pemerintah daerah. Sosialisasi ini tentu untuk membangun komunikasi konstruktif dalam pembentukan undang-undang.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan sosialisasi Prolegnas di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari, Senin (16/1). Pada tahun ini, Baleg telah menyusun Prolegnas RUU Prioritas sebanyak 39 RUU dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU. Prolegnas tersebut telah ditetapkan dalam

Rapat Paripurna DPR RI 15 Desember 2022 lalu.

"Selanjutnya berdasarkan tugas yang dimilikinya. Badan Legislasi mempunyai kewajiban menyosialisasikan Prolegnas dimaksud kepada masyarakat," jelas Baidowi di hadapan Sekda Sultra, para akademisi, dan pejabat daerah setempat. Ada dua sasaran yang ingin dicapai Baleg dari kegiatan sosialisasi ini. Yang utama adalah membangun komunikasi konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemda.

Masyarakat bisa mengetahui dengan detail proses penyusunan sebuah undang-undang. Bahkan, bisa memberi masukan dan kritik sekaligus.

”

DENGAN SOSIALISASI INI, MASYARAKAT MENGETAHUI RENCANA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG AKAN MENGATUR KEHIDUPAN MASYARAKAT, SEHINGGA DIHARAPKAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT, MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN MASUKAN-MASUKAN,...

Selain membangun komunikasi, sosialisasi ini, lanjut politisi PPP tersebut, tentu untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang memiliki kepentingan atas sebuah RUU atas keseluruhan RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023.

"Dengan sosialisasi ini, masyarakat mengetahui rencana pembentukan undang-undang yang akan mengatur kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, yang pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat," tutur Baidowi. **mh/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: MH/PDT

Anggaran DIPA DPR 2023 Diharapkan Terserap Maksimal

Wakil Ketua
Badan Urusan
Rumah Tangga
(BURT) DPR
RI Novita

Wijayanti mengingatkan pentingnya penyerapan anggaran DPR RI secara maksimal. Dia mengatakan penyerah DIPA DPR RI sudah disampaikan kepada 11 Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada pimpinan AKD agar anggaran yang ada terserap secara baik.

"Hari ini kita rapat dengan kesekjen menyerahkan DIPA kepada AKD 11 Komisi dan kelengkapan dewan yang lainnya, dan ini sudah didistribusikan dan angkanya memang anggaran DPR ini sekitar Rp6 Triliun, kita memang mengajukan 8 triliun dengan harapan DIPA yang sudah disampaikan ke AKD ini bisa langsung dikoordinasikan dengan pimpinan AKD masing-masing dari kepala sekertariat sehingga ini bisa diserap semaksimal mungkin," pungkasnya saat dimintai keterangan oleh **Parlementaria**, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/1).

Novita menilai, penyerapan anggaran DIPA ditahun 2022 hampir secara keseluruhan terserap secara baik. "Karena ini harus sesuai dengan perencanaan, dan 2022 penyerapannya dari AKD yang ada di DPR semuanya kesekjen, AKD, semuanya ini *alhamdulillah* memang dari sebelumnya ini adalah yang terbaik 98% rata-rata," imbuhnya.

”

**KARENA INI HARUS
SESUAI DENGAN
PERENCANAAN,
DAN 2022
PENYERAPANNYA
DARI AKD YANG ADA
DI DPR SEMUANYA
KESEKJENAN, AKD,
SEMUANYA INI
ALHAMDULILLAH
MEMANG DARI
SEBELUMNYA INI
ADALAH YANG
TERBAIK 98% RATA-
RATA.**

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, anggaran DIPA tahun 2023 lebih kecil dari tahun sebelumnya. "Harapannya walaupun anggaran DIPA tahun ini lebih kecil dari pada sebelumnya, tapi tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan kita untuk menyerap aspirasi masyarakat, konstituen, serta melaksanakan tugas-tugas pengawasan, serta membuat undang-undang sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan," harap Novita.

— tn/aha

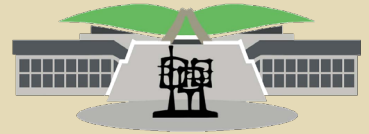
Wakil Ketua Badan Urusan
Rumah Tangga (BURT) DPR RI
Novita Wijayanti.



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: RSB/PDT



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat menerima delegasi Amerika Serikat di ruang tamu Pimpinan Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023). FOTO: MRI/PDT



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menerima kunjungan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Azad di perpustakaan pribadinya, daerah Bendungan Hilir, Jakarta, Selasa (17/1/2023). FOTO: MCN/PDT



Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi (kiri) mewakili Media Sosial DPR RI saat menerima penghargaan di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Rabu (11/1/2022). FOTO: UBED/PDT

